KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN

18 JULI-24 JULI 2026



085 - 169 - 767 - 212
@pemasyarakatanjogja

SAMBUTAN KAKANWIL



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) dapat menyusun laporan kegiatan ini. Publikasi ini merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan dokumentasi pelaksanaan tugas serta fungsi pemasyarakatan, sekaligus menjadi sarana informasi mengenai berbagai program, kegiatan, dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Seluruh kegiatan yang tersaji dalam laporan ini dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Asta Cita Presiden Republik Indonesia, 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 21 Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pedoman tersebut menjadi landasan dalam memperkuat pembinaan warga binaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.



Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja Kanwil Ditjenpas DIY secara menyeluruh, menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat, serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang semakin maju, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

M. ALI SYEH BANNA



Apel Pagi Rutin, Kanwil Ditjenpas DIY Perkuat Disiplin dan Semangat Kinerja Pegawai

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) kembali melaksanakan apel pagi rutin yang diikuti oleh seluruh pegawai di halaman kantor. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

Apel pagi tidak hanya menjadi sarana untuk mengecek kesiapan personel sebelum menjalankan tugas, tetapi juga sebagai wadah penyampaian informasi, evaluasi singkat, serta penguatan komitmen seluruh jajaran. Melalui kegiatan ini, setiap pegawai diharapkan memiliki kesamaan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam arahannya, pembina apel mengingatkan seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga integritas, meningkatkan kedisiplinan, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis. Selain itu, seluruh jajaran juga didorong untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi guna mendukung tercapainya program kerja Kanwil Ditjenpas DIY.



Melalui pelaksanaan apel pagi secara rutin, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen membangun budaya kerja yang positif dan produktif. Dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme, seluruh jajaran diharapkan mampu memberikan kinerja terbaik serta mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin berkualitas, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.



WUJUDKAN ASN BERAKHLAK, KANWIL DITJENPAS DIY PERKUAT NILAI SPIRITUAL MELALUI KAJIAN AL-QUR'AN

YOGYAKARTA – Dalam upaya membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai BerAKHLAK, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) menggelar kegiatan Penguatan Kerohanian bagi Pegawai, Senin (20/7), bertempat di Mushola Al-Ishlah Kanwil Ditjenpas DIY.



Kegiatan yang berlangsung khidmat dan diikuti oleh seluruh pegawai ini diawali dengan pembacaan Al-Qur'an secara mandiri yang dilanjutkan dengan kajian bersama mengenai makna serta kandungan ayat-ayatnya sebagai bentuk pembinaan mental dan spiritual aparatur. Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, ia menegaskan bahwa pembinaan spiritual merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter ASN yang berintegritas. Menurutnya, kompetensi dan profesionalisme harus senantiasa berjalan beriringan dengan keimanan serta akhlak yang baik agar setiap pegawai tidak hanya memahami nilai-nilai agama untuk diterapkan dalam tugas harian, melainkan juga mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik.



"Nilai-nilai BerAKHLAK tidak cukup hanya dipahami sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Penguatan kerohanian seperti ini menjadi sarana untuk membangun pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kepekaan dalam menjalankan amanah sebagai insan Pemasyarakatan," ujar Muhammad Ali Syeh Banna.

Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sekaligus sumber inspirasi dalam bekerja, sehingga dengan hati yang bersih dan niat yang lurus, setiap pegawai mampu menghadapi tantangan tugas secara sabar, ikhlas, dan penuh semangat pengabdian. Melalui kegiatan rutin penguatan kerohanian ini, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif dan profesional, tetapi juga religius serta harmonis demi memperkuat budaya kerja BerAKHLAK dan memastikan pelaksanaan tugas pemasyarakatan senantiasa menjunjung tinggi integritas, etika, dan nilai kemanusiaan.

Kakanwil Ditjenpas DIY Bekali Pegawai dengan Kemampuan Pijat Energy untuk Tingkatkan Kesehatan dan Kepedulian





YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY), Muhammad Ali Syeh Banna, membekali jajaran pegawai Kanwil Ditjenpas DIY dengan keterampilan Pijat Energy sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berorientasi pada pelayanan, Senin (20/7). Kegiatan yang berlangsung di Musala Al-Ishlah ini dilaksanakan setelah penguatan kerohanian pegawai sebagai rangkaian pembinaan jasmani dan rohani bagi aparatur.

Pelatihan ini merupakan bentuk perhatian pimpinan terhadap pentingnya menjaga kesehatan fisik dan ketahanan mental pegawai melalui keterampilan praktis yang bermanfaat. Sebelum sesi dimulai, Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, memberikan penguatan mental dan spiritual dalam suasana hangat kekeluargaan, seraya mengajak jajaran mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tugas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, melainkan juga kualitas kepribadian, integritas, dan ketenangan batin yang membentuk karakter ASN yang tangguh dan berakhlak.

Memasuki sesi praktik, para pegawai antusias mencoba teknik dasar pijat energi secara bergantian di bawah bimbingan langsung Kakanwil. Muhammad Ali Syeh Banna menjelaskan bahwa pijat energi adalah metode sederhana yang efektif menjaga kebugaran, melancarkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, sekaligus menumbuhkan empati antarpegawai.

“**Aparatur Pemasyarakatan harus memiliki kepedulian yang tinggi, baik terhadap kesehatan dirinya maupun terhadap orang lain. Ketika kita memiliki kemampuan untuk membantu sesama, sekecil apa pun, maka itu menjadi nilai tambah dalam membangun budaya kerja yang humanis dan penuh kepedulian,"** ungkapnya.

Ia menekankan bahwa budaya hidup sehat harus menjadi bagian dari keseharian untuk mendukung pelaksanaan tugas yang dinamis. Melalui pelatihan ini, ilmu yang diperoleh diharapkan dapat terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari guna memberikan pertolongan sederhana kepada keluarga, rekan kerja, maupun masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Kanwil Ditjenpas DIY dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.



KAKANWIL DITJENPAS DIY LANTIK JFT, PESANKAN INTEGRITAS DAN ETOS KERJA



YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi melantik sejumlah Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) di lingkungan Kanwil Ditjenpas DIY pada Senin (20/7).

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural, serta para kepala unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan di wilayah Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjenpas DIY menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan fungsi pelayanan publik berbasis keahlian spesifik, di mana jabatan fungsional tertentu dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan arah kemajuan instansi. Pada kesempatan berharga tersebut, beliau memberikan pesan mendalam kepada para pegawai yang baru dilantik agar segera **"tancap gas"** bekerja serta senantiasa menjaga integritas dalam mengemban amanah baru mereka.



"Saya berpesan agar seluruh pegawai yang baru saja dilantik dapat segera beradaptasi dengan ritme kerja yang baru. Berikan kontribusi terbaik Anda, inovasi, dan dedikasi penuh bagi kemajuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke depannya," tegas Kakanwil dalam arahannya.

Kakanwil juga menambahkan bahwa tantangan tugas di bawah naungan Kemenimipas akan semakin dinamis, sehingga menuntut profesionalisme dan komitmen tinggi dari setiap lini aparatur sipil negara (ASN). Prosesi pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari seluruh tamu undangan kepada para pejabat yang baru dilantik serta sesi foto bersama.



KANWIL DITJENPAS DIY DAN PKBI BANGUN KOLABORASI DUKUNG MASA DEPAN ANAK BINAAN



YOGYAKARTA – Momentum Hari Anak Nasional 2026 akan dimanfaatkan sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan kedua dan masa depan yang lebih baik. Semangat tersebut mengemuka dalam audiensi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Senin (20/7), di Kantor Wilayah Ditjenpas DIY.

Audiensi yang dihadiri Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, jajaran LPKA Kelas II Yogyakarta, serta perwakilan PKBI ini membahas persiapan peringatan Hari Anak Nasional sekaligus penguatan program reintegrasi sosial bagi Anak Binaan. Dalam kesempatan tersebut, PKBI memaparkan rencana penyelenggaraan kegiatan Reintegrasi Sosial di Griya Abhipraya bekerja sama dengan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), yang diawali konseling pada 22–23 Juli 2026 dan dilanjutkan implementasi Program Inklusi pada 1 Agustus 2026. Program gerakan inklusi di sepuluh regional Indonesia ini ditujukan agar Anak Binaan LPKA Kelas II Yogyakarta memperoleh dukungan psikososial, motivasi, serta ruang untuk membangun kembali kepercayaan diri sebelum kembali ke tengah masyarakat.

"Jangan hanya berbicara tentang pembinaan, tetapi tunjukkan hasilnya. Cerita keberhasilan anak-anak yang telah kembali ke masyarakat akan menjadi inspirasi sekaligus mengubah cara pandang masyarakat terhadap proses pembinaan di LPKA," tegas Ali Syeh Banna.



Merespons masukan tersebut, PKBI menyambut baik seluruh saran untuk diteruskan ke tingkat nasional sekaligus mengungkapkan rencana perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ditjenpas hingga tahun 2028 guna memperkuat sinergi pembinaan. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan sistem pembinaan yang inklusif melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat. Melalui kerja sama yang erat, peringatan Hari Anak Nasional diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan momentum nyata untuk menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik.

JAJARAN KANWIL DITJENPAS DIY IKUTI PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI DARI INSPEKTUR JENDERAL KEMENIMIPAS



YOGYAKARTA – Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) mengikuti kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (20/7).

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, didampingi para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, JFT, serta jajaran pegawai Kanwil Ditjenpas DIY sebagai upaya memperkokoh tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam paparannya, Inspektur Jenderal menegaskan bahwa pengawasan internal harus dijalankan secara profesional, responsif, dan akuntabel sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga langkah preventif. Disusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 menjadi implementasi kebijakan pengawasan intern yang adaptif, terintegrasi, berbasis risiko, serta berorientasi pada hasil guna mendukung terwujudnya visi IMIPAS Prima.

Selain memperkuat pemahaman fungsi pengawasan, kegiatan ini mengulas berbagai titik rawan penyimpangan dalam layanan Pemasyarakatan yang harus dicegah, mulai dari penyelundupan barang terlarang, praktik pungutan liar kamar hunian, penyalahgunaan layanan integrasi dan remisi, manipulasi data penelitian kemasyarakatan, penyimpangan pengadaan bahan makanan, hingga manipulasi barang bukti hasil razia. Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, menyampaikan bahwa materi ini menjadi arahan krusial untuk membentengi seluruh jajaran dari praktik fraud.



"Penguatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, memperkuat integritas, serta memastikan setiap layanan Pemasyarakatan diberikan secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan," tegasnya.

Melalui penguatan ini, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen untuk terus memperkuat budaya pengawasan internal dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Muhammad Ali Syeh Banna berharap seluruh jajaran mampu mengimplementasikan materi yang diperoleh ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur, Kanwil Ditjenpas DIY optimistis dapat mewujudkan tata kelola Pemasyarakatan yang semakin berintegritas, transparan, dan mendapat kepercayaan penuh dari publik.

Kanwil Ditjenpas DIY Perkuat Sinergi Bersama Kejari Yogyakarta Bahas Pelaksanaan Pelatihan Kerja ABH dan Pidana Kerja Sosial KUHP Baru

YOGYAKARTA - Jajaran Pemasyarakatan DIY yang terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY, Bapas Kelas I Yogyakarta, dan LPKA Kelas II Yogyakarta menggelar koordinasi strategis dengan Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada Senin (20/7). Bertempat di Kantor Kejari Yogyakarta, pertemuan ini difokuskan untuk membahas mekanisme pelaksanaan putusan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta persiapan implementasi pidana kerja sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Hartono, didampingi Kasi Pidum Sigit Kristianto, serta dihadiri oleh Kabapas Kelas I Yogyakarta Galih Rakasiwi, Kepala LPKA Kelas II Yogyakarta Supar, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Madya Lely Mareyke Pajouw, dan Penyuluh Hukum Kanwil Ditjenpas DIY. Pembahasan utama menyoroti eksekusi putusan seorang ABH yang dijatuhi pidana penjara dua tahun beserta pelatihan kerja selama enam bulan. Mempertimbangkan domisili anak yang berada di Provinsi Jawa Barat, seluruh pihak menyepakati kemungkinan pelaksanaan pelatihan kerja di wilayah domisili anak demi mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interests of the child)*.



Kejaksaan Negeri Yogyakarta selaku eksekutor menyambut baik langkah koordinasi lintas wilayah tersebut sepanjang tetap berada di koridor hukum dan memenuhi aspek akuntabilitas. Mekanisme pelaksanaan pelatihan kerja di Jawa Barat nantinya akan dikoordinasikan secara intensif bersama Bapas dan Kejari setempat, di mana setiap perkembangan kegiatan wajib didokumentasikan serta dilaporkan secara berkala kepada Kejari Yogyakarta guna memastikan fungsi pengawasan dan kepastian hukum tetap berjalan optimal.

Selain pembahasan kasus spesifik anak, pertemuan interaktif ini juga menjadi wadah penguatan sinergi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menyongsong penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana alternatif dalam KUHP baru. Melalui koordinasi berkelanjutan ini, Kanwil Ditjenpas DIY dan Kejari Yogyakarta menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan hak, keadilan, serta efektivitas proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak ke tengah masyarakat.

Kanwil Ditjenpas DIY Susun Pedoman Pembinaan bagi Pegawai yang Menjalani Hukuman Disiplin







YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Pembinaan bagi Pegawai yang Sedang Menjalani Hukuman Disiplin di Aula Lantai 1 Kanwil Ditjenpas DIY, Senin (20/7). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, perwakilan pengelola SDM, unsur Kepatuhan Internal, pegawai berlatar belakang pendidikan psikologi, serta pembina mental rohani sebagai langkah awal penyusunan pedoman pembinaan yang komprehensif.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum yang menekankan pentingnya penyusunan pedoman sebagai acuan pembinaan bagi pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin. Pedoman tersebut juga menjadi bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang diharapkan mampu menghadirkan sistem pembinaan yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada perubahan perilaku pegawai.

Dalam sesi diskusi, peserta menyepakati bahwa pembinaan akan dimulai sejak diterbitkannya Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SK Hukdis) melalui tahapan asesmen, penentuan pola pembinaan, hingga monitoring dan evaluasi. Pada tahap awal, asesmen akan dilakukan melalui metode wawancara dan observasi untuk memetakan profil pegawai, sementara pengembangan jangka panjang direncanakan melibatkan tenaga profesional agar instrumen asesmen memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pola pembinaan juga akan mengadopsi dan memodifikasi praktik baik yang pernah diterapkan di Lapas Lembata.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Ditjenpas DIY akan melaksanakan diskusi lanjutan guna menyusun parameter pembinaan berdasarkan jenis pelanggaran disiplin dengan melibatkan praktisi psikologi, agama, SDM, penyuluh, dan kepatuhan internal. Selain itu, akan disiapkan variabel pedoman wawancara dan observasi serta infografis alur pelaksanaan FGD yang disesuaikan dengan timeline Proyek Perubahan PKN II. Melalui penyusunan pedoman ini, diharapkan pembinaan terhadap pegawai yang menjalani hukuman disiplin dapat terlaksana secara sistematis, objektif, dan mendukung peningkatan integritas serta profesionalisme aparatur di lingkungan Kanwil Ditjenpas DIY.

GANDENG KETUA PWI DIY, KANWIL DITJENPAS DORONG HUMAS LEBIH KREATIF BANGUN CITRA POSITIF



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Public Relation Summit 2026 pada Selasa (21/7) dengan mengusung tema "Membangun Citra Positif Pemasyarakatan Melalui Jurnalistik dan Media Digital". Kegiatan ini menghadirkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY, Hudono, sebagai narasumber utama untuk membagikan ilmu serta kiat-kiat jurnalistik kepada pengelola kehumasan di lingkungan Kanwil, Lapas, Rutan, Bapas, dan LPKA se-DIY. Melalui pelatihan teknik penulisan berita, fotografi jurnalistik, hingga desain komunikasi visual, para insan humas didorong untuk mampu menyajikan publikasi yang lebih adaptif, informatif, dan profesional.

Dalam pemaparannya yang bertajuk "Kiat Menulis Berita dan Artikel Instansi Pemerintah", Ketua PWI DIY Hudono mengajak para peserta untuk lebih kreatif dalam mengemas informasi agar pesan institusi dapat tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat.



"Untuk meningkatkan citra positif itu tentu dibutuhkan berita yang bagus, utamanya informasi yang dibutuhkan masyarakat, misalnya terkait layanan," tutur Hudono.

Sementara itu, Kakanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, menegaskan peran strategis humas sebagai ujung tombak organisasi. Ia meminta insan humas mengubah cara pandang publikasi agar tak sekadar mengejar kuantitas atau dokumentasi semata.

"Publikasi bukan sekadar mengejar jumlah berita atau unggahan, melainkan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Setiap informasi yang dipublikasikan harus cepat, akurat, berbasis data, mudah dipahami, dan menjunjung tinggi etika serta profesionalisme," tegas Ali.

Sinergi arahan strategis Kakanwil dan ilmu jurnalistik Ketua PWI DIY ini diharapkan dapat memacu para petugas humas menyajikan narasi yang informatif, edukatif, dan berdampak. Dengan publikasi yang berkualitas, Kanwil Ditjenpas DIY optimistis mampu memperkuat keterbukaan informasi sekaligus mendongkrak kepercayaan publik terhadap institusi Pemasyarakatan di Yogyakarta.



Kanwil Ditjenpas DIY Laksanakan Monitoring dan Evaluasi di Lapas Narkotika Yogyakarta, Perkuat Pembinaan dan Keamanan



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Selasa (21/7). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban melalui evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan serta pelayanan pemasyarakatan.

Tim Kanwil Ditjenpas DIY melakukan peninjauan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemasyarakatan, meliputi pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelayanan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), administrasi pembinaan, hingga pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Lapas. Selain melakukan evaluasi, tim juga memberikan penguatan serta rekomendasi terhadap aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan guna mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan yang lebih optimal.



Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, pelaksanaan program pembinaan dan pelayanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, sejumlah masukan diberikan sebagai bahan penyempurnaan administrasi, peningkatan kualitas program pembinaan, serta optimalisasi pelayanan kepada WBP. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

Sebagai tindak lanjut, Kepala Kantor Wilayah menekankan agar seluruh hasil monitoring dan evaluasi segera ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi yang terukur dan pelaporan pelaksanaannya kepada Kantor Wilayah. Optimalisasi program pembinaan, pelayanan yang profesional, akuntabel, dan transparan, serta pengawasan internal yang dilakukan secara berkala menjadi perhatian utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas. Hasil monitoring dan evaluasi ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kinerja jajaran Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kanwil Ditjenpas DIY Gelar Galawicara TikTok, Kupas Manfaat E-Purchasing Melalui Platform E-Katalog

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) kembali menghadirkan edukasi publik melalui siaran langsung Galawicara di akun TikTok Pemasyarakatan Jogja. Mengusung tema "Manfaat E-Purchasing Melalui Platform E-Katalog", kegiatan ini dilaksanakan di Galeri Pemasyarakatan DIY sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan jajaran pemasyarakatan mengenai sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, efektif, dan akuntabel.



Hadir sebagai narasumber, Mochamad Nurman Hidayat, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya, memaparkan berbagai manfaat penerapan e-purchasing melalui platform E-Katalog. Ia menjelaskan bahwa sistem pengadaan secara elektronik mampu mempercepat proses belanja pemerintah, mempermudah pemilihan produk yang telah terverifikasi, serta mewujudkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.

Selain menjadi sarana berbagi pengetahuan, pelaksanaan Galawicara di Galeri Pemasyarakatan DIY juga bertujuan memperkenalkan sekaligus memperluas pemasaran berbagai produk karya warga binaan pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama siaran berlangsung, penonton disuguhkan visual beragam produk unggulan hasil pembinaan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mendukung dan membeli produk-produk tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil pembinaan kemandirian warga binaan.



Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas DIY terus mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi, publikasi, dan promosi. Diharapkan, Galawicara tidak hanya menjadi wadah penyebarluasan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat citra positif pemasyarakatan serta membuka peluang yang lebih luas bagi produk karya warga binaan untuk dikenal dan bersaing di pasar yang lebih luas.

KANWIL DITJENPAS DIY IKUTI SOSIALISASI PERMENIMIPAS NOMOR 9 TAHUN 2026, PERKUAT PENGELOLAAN BMN DAN CEGAH FRAUD PBJ

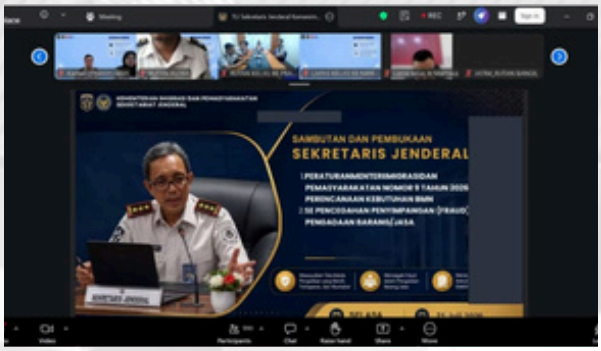

YOGYAKARTA - Jajaran Bagian Tata Usaha dan Umum beserta Tim Barang Milik Negara (BMN) dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kanwil Ditjenpas DIY mengikuti kegiatan sosialisasi nasional secara virtual pada Selasa (21/7). Kegiatan ini membahas Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Permenimipas) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN serta Surat Edaran Pencegahan Penyimpangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).

Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia. Dalam arahannya, Asep menekankan pentingnya pemahaman yang utuh serta komitmen bersama dari seluruh jajaran dalam mengimplementasikan regulasi baru tersebut. Langkah ini menjadi instrumen vital dalam memperkuat pengawasan internal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel di lingkungan Kemenimipas.

Pemaparan dilanjutkan oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN yang menjelaskan bahwa Permenimipas Nomor 9 Tahun 2026 menjadi pedoman resmi satuan kerja dalam menyusun Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) berdasar Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Penyampaian RKBMN kini dilakukan secara elektronik terintegrasi melalui aplikasi SIMAN. Selain itu, dipaparkan pula penekanan Surat Edaran terkait pencegahan fraud PBJ, salah satunya dengan mengoptimalkan mekanisme Clearing House sebagai pengendalian preventif sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia.

Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi ini, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh ketentuan perencanaan BMN dan pencegahan penyimpangan pengadaan secara konsisten. Langkah preventif dan penerapan sistem digitalisasi ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan BMN yang tepat sasaran, efektif, serta bebas dari praktik fraud di lingkungan Pemasyarakatan D.I. Yogyakarta.

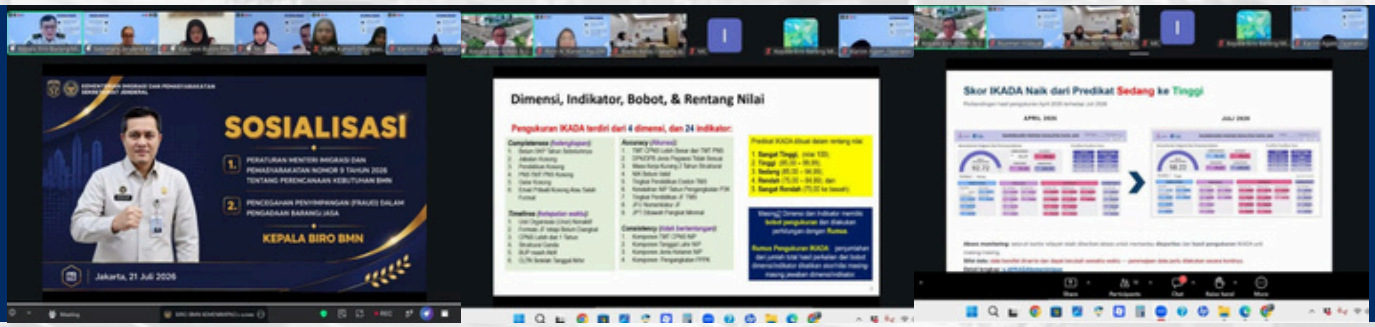

Sekretaris Kemenko Hukum dan Imipas Tinjau Lapas Wirogunan, Apresiasi Kualitas Layanan dan Pembinaan Warga Binaan



YOGYAKARTA – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, R. Andika, melaksanakan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta (Lapas Wirogunan), dalam rangka meninjau secara langsung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan serta pelaksanaan program pembinaan bagi warga binaan, Rabu (22/7).

Dalam kunjungan tersebut, R. Andika meninjau sarana layanan di Lapas Wirogunan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan mengedepankan prinsip pelayanan prima. Ia juga berdialog langsung dengan para pembesuk serta warga binaan guna memastikan kualitas layanan bebas dari praktik pungutan liar, di mana seluruh responden mengonfirmasi bahwa layanan berlangsung baik tanpa dipungut biaya.

Saat meninjau area bimbingan kerja (Bimker), R. Andika mengapresiasi program pembinaan kemandirian yang dinilai sukses membekali warga binaan dengan keterampilan produktif. Pada kesempatan itu, ia memotivasi para warga binaan agar menjadikan masa pidana sebagai momentum memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik sebelum kembali ke masyarakat.

"Kalian harus tetap semangat. Jadikan masa pembinaan ini sebagai kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali berkontribusi positif di masyarakat," pesannya kepada warga binaan.





Kunjungan kerja ini menjadi wujud komitmen Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam memastikan penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan secara profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan pembinaan yang berdampak bagi warga binaan.



Sekretaris Kemenko Kumham Imipas Apresiasi Kegiatan GA Bapas Yogyakarta

YOGYAKARTA – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, R. Andika Dwi Prasetya, meninjau pelayanan publik di Griya Abhipraya (GA) Purbonegoro Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, Rabu (22/7). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan berjalan secara optimal, sekaligus memperkuat peran Griya Abhipraya sebagai wadah pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan pemberdayaan klien.



Dalam kunjungan tersebut, R. Andika Dwi Prasetya, yang didampingi Kakanwil Ditjenpas DIY Muhammad Ali Syeh Banna beserta jajaran, meninjau langsung layanan dan program pembimbingan bagi klien pemasyarakatan. Peninjauan ini bertujuan memastikan pelayanan yang ada mampu mendukung reintegrasi sosial dan kemandirian klien. Pada kesempatan itu, ia memberikan penguatan dan menegaskan, **"Griya Abhipraya adalah rumah bagi klien pemasyarakatan untuk menjadi lebih baik,"** sembari memotivasi klien agar memanfaatkan program yang ada sebagai bekal perbaikan diri.

R. Andika Dwi Prasetya turut menyampaikan apresiasinya atas pelayanan humanis dan profesional yang dihadirkan jajaran Kanwil Ditjenpas DIY melalui Griya Abhipraya Purbonegoro. Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan berkualitas. Menurutnya, pembimbingan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan upaya membangun kepercayaan diri dan kemandirian klien agar siap berperan positif di masyarakat.



Melalui kunjungan ini, sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan jajaran Ditjenpas diharapkan dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan publik. Griya Abhipraya pun diharapkan terus menjadi ruang pembinaan yang memberi harapan baru sekaligus mendukung keberhasilan proses reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

KANWIL DITJENPAS DIY, DUKUNG PENYUSUNAN REGULASI PENGELOLAAN CABANG RUTAN BERSAMA PUSTRAKA KEMENIMIPAS



YOGYAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus mematangkan regulasi tata kelola kelembagaan di lingkungan pemasyarakatan. Melalui Pusat Strategi Kebijakan (Pustraka), dua orang Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebijakan diterjunkan langsung untuk melakukan pengumpulan data lapangan di Kanwil Ditjenpas DIY dan BNNP DIY pada Rabu (22/7).

Kunjungan kajian ini difokuskan pada penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan (Rutan). Kedatangan tim Pustraka disambut langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas DIY, Ganang Utoyo.

Kabid Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas DIY, Ganang Utoyo, menyampaikan bahwa pengumpulan data lapangan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan regulasi yang disusun memiliki pijakan empiris yang kuat. Salah satu fokus perhatian dalam pengumpulan data ini mencakup status Lapas Kelas IIB Wonosari yang saat ini masih menjadi Cabang Rutan BNNP DIY, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.04.OT.01.02.01 Tahun 2015.



"Kajian ini sangat penting untuk menyelaraskan regulasi pengelolaan cabang rutan agar sesuai dengan tuntutan dinamika organisasi saat ini. Seluruh data dan masukan empiris dari lapangan akan menjadi bahan evaluasi substantif dalam perumusan Rpermenimipas yang baru," ujar Ganang.

Kegiatan pengumpulan data yang mengacu pada Permenimipas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenimipas tersebut berlangsung dengan tertib dan lancar. Hasil dari peninjauan ini diharapkan mampu melahirkan produk hukum yang adaptif, komprehensif, serta mampu memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan cabang rutan di seluruh Indonesia.



KANWIL DITJENPAS DIY PERKUAT TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KINERJA LEWAT ANEV TRIWULAN II KEMENIMIPAS

YOGYAKARTA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) mengikuti Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Capaian Kinerja Triwulan II Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (22/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.



Rapat Anev tingkat nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta diikuti oleh seluruh unit Eselon I dan jajaran Kantor Wilayah se-Indonesia, baik secara luring maupun daring. **"Kegiatan anev yang kita laksanakan hari ini merupakan upaya bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjaga agar sasaran-sasaran strategis yang sudah kita tetapkan dapat berjalan secara efektif,"** tegas Menteri Agus dalam arahannya.

Dalam rapat evaluasi berkala ini, seluruh unit Eselon I memaparkan realisasi indikator kinerja, capaian program prioritas, penyerapan anggaran, hingga langkah percepatan untuk semester berikutnya. Paparan disampaikan secara berurutan mulai dari Sekretaris Jenderal Asep Kurnia, Inspektur Jenderal Rudi Setiawan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, hingga Plt. Kepala BPSDM Muhammad Tito Andrianto.

Menanggapi arahan pimpinan pusat, jajaran Kanwil Ditjenpas DIY siap mengakselerasi kinerja pada Semester II dengan memfokuskan perhatian pada efektivitas dan kualitas belanja negara guna melahirkan pelayanan publik yang prima serta meningkatkan kualitas pembinaan Warga Binaan. Hal ini sejalan dengan penekanan Menteri Agus bahwa penyerapan anggaran merupakan sarana strategis untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Melalui keikutsertaan dalam rapat Anev Triwulan II ini, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen untuk terus menerapkan manajemen kinerja yang berkelanjutan sebagai pijakan dalam mengoptimalkan tata kelola organisasi yang profesional, responsif, berintegritas, dan akuntabel di wilayah D.I. Yogyakarta.





Hari Anak Nasional 2026, Ditjenpas DIY Tegaskan Komitmen Wujudkan Masa Depan Anak Binaan

YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan D.I. Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) menggelar Upacara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 secara serentak pada Kamis (23/7). Kegiatan utama dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta bersama seluruh petugas dan Anak Binaan, sedangkan jajaran pegawai kantor wilayah turut melaksanakan upacara secara khidmat di halaman Kantor Wilayah DIY dengan Inspektur Upacara Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kristiana Hambawani.

Dalam amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI yang dibacakan pada kedua tempat tersebut, ditekankan bahwa Peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk memperkuat kepedulian seluruh elemen bangsa dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara adil dan tanpa diskriminasi. Lingkungan yang aman, inklusif, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, mulai dari pemenuhan hak hidup, pendidikan, hingga perlindungan menjadi fondasi utama dalam menyiapkan generasi penerus bangsa menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sistem Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Ditjenpas DIY menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembinaan kepada Anak Binaan secara humanis, edukatif, dan senantiasa berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak *(the best interests of the child)*. Pembinaan yang berkualitas tidak sekadar bertujuan memberikan efek pembelajaran, tetapi juga membina karakter, meningkatkan keterampilan, membangun rasa percaya diri, serta menumbuhkan optimisme agar mereka mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab.



"Anak-anak adalah aset bangsa yang harus terus kita jaga dan bimbing. Masa lalu tidak menentukan masa depan, sehingga melalui pembinaan yang baik, mereka diharapkan mampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik," tegas Muhammad Ali Syeh Banna. Melalui peringatan HAN 2026 ini, Kanwil Ditjenpas DIY menegaskan komitmen dan sinerginya untuk menghadirkan pembinaan berbasis HAM, guna memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan cerah.

PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL, KANWIL DITJENPAS DIY HADIAHI PENGUARANGAN MASA PIDANA BAGI 7 ANAK BINAAN DI LPKA YOGYAKARTA





WONOSARI – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2026 dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 7 Anak Binaan, Kamis (23/7). SK diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY, Muhammad Ali Syeh Banna.

Kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen negara dalam memberikan penghargaan kepada Anak Binaan yang menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan. Pemberian PMP diharapkan menjadi motivasi bagi mereka untuk terus memperbaiki diri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebanyak 5 Anak Binaan memperoleh pengurangan masa pidana selama 1 bulan, sedangkan 2 Anak Binaan lainnya menerima pengurangan selama 2 bulan.

Dalam sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibacakan Kakanwil, ditegaskan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk memperkuat pemenuhan hak-hak anak, termasuk Anak Binaan. Mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan", setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, serta kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Muhammad Ali Syeh Banna berharap pemberian Pengurangan Masa Pidana dapat menjadi penyemangat bagi Anak Binaan untuk terus belajar, beribadah, disiplin, dan mengembangkan potensi diri. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung proses pembinaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai generasi yang lebih baik.

KAKANWIL DITJENPAS DIY BERI WEJANGAN HINGGA PELATIHAN PIJAT ENERGY BAGI WARGA BINAAN LAPAS WONOSARI





WONOSARI – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY), Muhammad Ali Syeh Banna, memberikan penguatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Wonosari, Kamis (23/7). Kegiatan berlangsung di Masjid Lapas sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan kepribadian warga binaan.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menyampaikan motivasi serta mengajak warga binaan untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia menekankan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ali Syeh Banna juga mengingatkan agar masa pembinaan dimanfaatkan sebagai waktu untuk introspeksi, meningkatkan kualitas diri, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat.

Selain memberikan penguatan mental dan spiritual, Kakanwil turut memberikan pelatihan pijat energi kepada para warga binaan. Pelatihan ini bertujuan membekali mereka dengan keterampilan praktis yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan sekaligus menjadi bekal kemandirian.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas DIY berharap warga binaan tidak hanya memperoleh pembinaan kepribadian, tetapi juga keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah bebas nanti. Pembinaan yang berkelanjutan diharapkan mampu mendukung proses reintegrasi sosial dan mewujudkan warga binaan yang lebih produktif.

Kanwil Ditjenpas DIY Ikuti Sosialisasi Kelayan Binter dan Foris, Perkuat Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan





YOGYAKARTA - Jajaran Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas D.I. Yogyakarta beserta Bapas di wilayah DIY mengikuti kegiatan sosialisasi nasional Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) dan Forum Reintegrasi Sosial (Foris) secara virtual pada Kamis (23/7). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna memperkuat program reintegrasi sosial berbasis masyarakat bagi klien Pemasyarakatan.

Sosialisasi dibuka langsung oleh Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan yang memaparkan landasan pembentukan Kelayan Binter berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-01.PK.04.02 Tahun 2026. Forum kemitraan berbasis masyarakat ini dirancang untuk membantu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melalui berbagai fungsi strategis, seperti koordinasi, pembimbingan, mediasi, edukasi, pendampingan, hingga monitoring dan pelaporan.

Kehadiran Kelayan Binter menjadi solusi inovatif dalam mempermudah akses layanan integrasi, termasuk mengatasi kendala geografis, ekonomi, maupun perizinan kerja yang kerap dialami klien saat wajib lapor. Dengan mengandalkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan keluarga, pemerintah desa / kelurahan, tokoh masyarakat, Babinsa / Bhabinkamtibmas, hingga dunia usaha, Bapas bertindak sebagai penghubung dan mediator utama untuk menghapus stigma negatif serta menekan angka residivisme.

Selain pemaparan mengenai Kelayan Binter dan rencana pembentukan Kerja Sama (PKS) Foris di tingkat wilayah, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama turut menyampaikan penguatan implementasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas DIY siap mengimplementasikan program Kelayan Binter guna mewujudkan reintegrasi sosial klien Pemasyarakatan yang aman, produktif, berkelanjutan, serta diterima penuh oleh masyarakat.

Lindungi Kesehatan WBP, Kanwil Ditjenpas DIY Perkuat Kolaborasi dengan Dinkes

YOGYAKARTA – Upaya mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bebas dari AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria pada tahun 2030 membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk jajaran pemasyarakatan. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) menjadi tuan rumah Pertemuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) Tahun 2026–2030, Kamis (23/7).

Kegiatan yang dihadiri berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam menyusun strategi bersama untuk memperkuat pencegahan, pengendalian, serta penanganan penyakit menular di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan DIY menegaskan bahwa pencapaian target eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria pada tahun 2030 hanya dapat terwujud melalui sinergi seluruh pihak. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program, kegiatan, serta indikator kinerja lintas instansi agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan terintegrasi selama lima tahun ke depan.

Dalam forum tersebut, peserta membahas rancangan program penanggulangan yang turut menyoroti peran strategis jajaran Pemasyarakatan dalam menjaga kesehatan warga binaan. Sebagai bentuk tindak lanjut penanggulangan Malaria, tenaga kesehatan di lingkungan Pemasyarakatan akan mengoptimalkan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), melakukan skrining bagi warga binaan dari daerah endemis, serta memperkuat pengawasan kebersihan blok hunian. Langkah ini menjadi bagian penting dari komitmen bersama dalam meminimalkan potensi penyebaran penyakit menular di dalam lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu, pada aspek pengendalian Tuberkulosis, disepakati penyediaan ruang hunian khusus penderita penyakit menular, penguatan pengendalian infeksi, hingga peningkatan kapasitas petugas dan nakes dalam mendeteksi gejala TBC sejak dini. Terkait HIV/AIDS, fokus diarahkan pada penguatan supervisi serta pelaporan rutin terhadap kegiatan penjangkauan, skrining, dan pemeriksaan HIV bagi tahanan maupun narapidana. Pendekatan komprehensif ini dirancang agar deteksi dini berjalan optimal sekaligus memastikan seluruh warga binaan mendapatkan akses penanganan kesehatan yang tepat.

Kanwil Ditjenpas DIY menegaskan pemenuhan layanan kesehatan merupakan hak dasar warga binaan sekaligus langkah mencegah penularan ke masyarakat. Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan DIY, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen mendukung RAD 2026–2030 demi mewujudkan lingkungan Pemasyarakatan yang sehat dan menyukseskan target eliminasi penyakit menular di DIY.



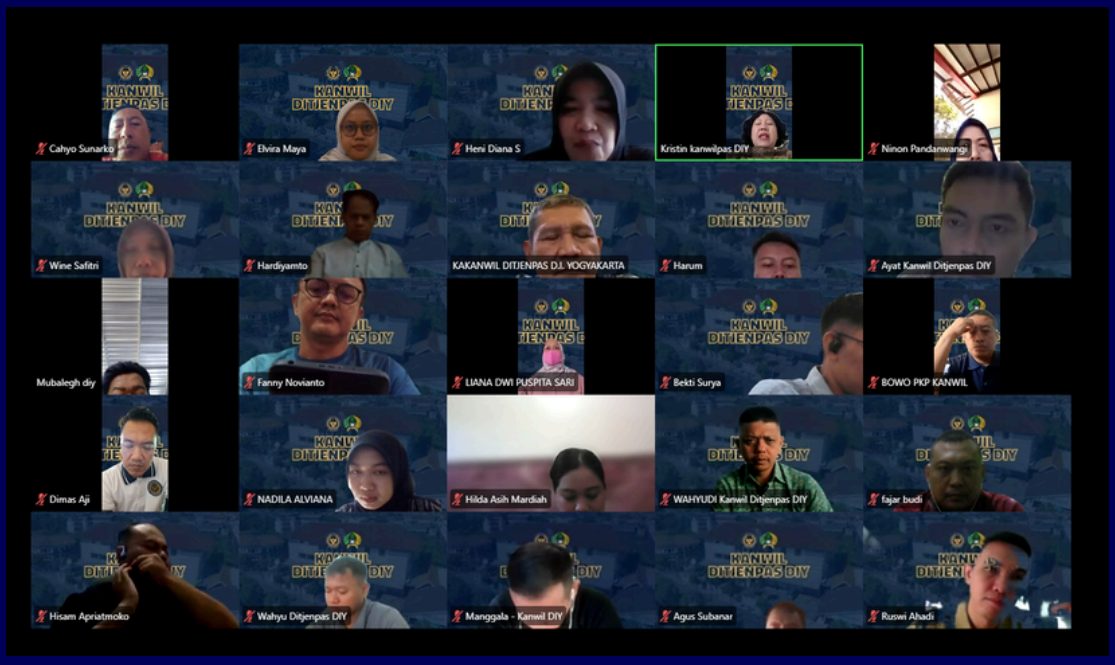

APRESIASI KINERJA JAJARAN, KAKANWIL DITJENPAS DIY AJAK TERUS UKIR PRESTASI

YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY), Muhammad Ali Syeh Banna, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dalam apel virtual yang digelar pada akhir pekan ini. Apresiasi tersebut diberikan atas dedikasi, kerja sama, dan komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Kakanwil menyampaikan bahwa capaian yang telah diraih selama satu pekan terakhir merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran. Ia berharap semangat kebersamaan dan profesionalisme tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selain memberikan apresiasi, Kakanwil juga mengingatkan seluruh jajaran untuk mempersiapkan berbagai agenda dan program kerja yang akan dilaksanakan pada pekan mendatang. Persiapan yang matang dinilai menjadi kunci agar setiap kegiatan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan menghasilkan capaian yang optimal.

Menutup arahannya, Muhammad Ali Syeh Banna mengajak seluruh jajaran Pemasyarakatan DIY untuk terus bergerak maju, meningkatkan kualitas kinerja, dan menghadirkan inovasi dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan semangat "Satu Langkah Lebih Maju, Mengukir Prestasi," ia optimistis seluruh jajaran mampu mewujudkan Pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, dan berprestasi.

KINERJA GEMILANG DI BIDANG ANGGARAN, KAKANWIL DITJENPAS DIY APRESIASI PRESTASI RUTAN WATES





YOGYAKARTA – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates kembali menorehkan prestasi dengan meraih Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta Penghargaan Terbaik III Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Selapanan III Tahun Anggaran 2026, Jumat (24/7).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Ali Syeh Banna, mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil komitmen dan kerja keras seluruh jajaran dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas dalam setiap proses.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi Rutan Wates untuk terus mempertahankan kinerja sekaligus menjadi inspirasi bagi seluruh satuan kerja pemasyarakatan di DIY dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara guna mendukung pelayanan publik yang semakin optimal.

Kanwil Ditjenpas DIY Dukung Penguatan Kepribadian Klien Pemasyarakatan Melalui Penyuluhan Agama Islam



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus memperkuat pembinaan bagi klien pemasyarakatan melalui kegiatan Bimbingan Kepribadian dan Penyuluhan Agama Islam yang diselenggarakan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari, Jumat (24/7). Kegiatan ini dihadiri Kepala Bapas Kelas II Wonosari, jajaran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Wonosari, tiga Pembimbing Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas DIY, serta para klien pemasyarakatan.

Mewakili Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Suprihanto menyampaikan bahwa pembimbingan kepribadian merupakan bagian penting dalam proses pemasyarakatan untuk membentuk klien yang berkarakter, sadar hukum, dan siap kembali ke masyarakat. Materi yang disampaikan Ustadz Munif Tauhid, S.Psi., menekankan pentingnya akhlak mulia, taubat nasuha, serta penguatan mental dan spiritual sebagai bekal menjalani kehidupan yang lebih baik.

Sejalan dengan komitmen Kanwil Ditjenpas DIY, pembinaan klien tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pembentukan karakter melalui sinergi dengan Bapas dan tokoh agama. Diharapkan, para klien mampu menjalani reintegrasi sosial dengan baik, tidak mengulangi tindak pidana, serta menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Munif Tauhid, S.Psi.

KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan.

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY,

Muhammad Ali Syeh Banna



MUHAMMAD ALI SYEH BANNA
KAKANWIL DITJENPAS DIY